

EDUCIVILIA

Jurnal Pengabdian pada Masyarakat

Antisipasi Teror Politik Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa *Politic Terror Anticipation of District Head Election*

Irwan Efendi^{1a}, Uswatun Hasanah¹, Tanti Rustianah^{1a}

¹Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Djuanda, Jl Tol Ciawi No 1 Kotak Pos 35 Ciawi Bogor 16270

^aKorespondensi: Irwan Efendi, Email: irwanefendi49@yahoo.co.id

ABSTRAK

Partisipasi politik masyarakat desa akan berjalan dengan lancar apabila ada perilaku politik dari masyarakat desa dan sosialisasi politik serta komunikasi politik yang baik dari para bakal calon kepala desa. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa berlangsung, dengan berbagai cara yang seringkali mengabaikan etika politik, seperti adanya intrik-intrik terror dan politik uang. Metode Pelaksanaan kegiatan Pengabdian masyarakat dimulai dengan observasi lapangan. Pelaksanaan kegiatan untuk menggali informasi tentang monografi dan gambaran profil desa, jumlah aparatur pemerintah desa, serta informasi mengenai kegiatan masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan bahwa sosialisasi politik dan pendidikan bagi masyarakat yang sudah wajib memilih sangat penting untuk dilakukan. Upaya pelestarian sistem politik dapat dilaksanakan dengan sejumlah kegiatan politik, antara lain sosialisai politik dan pendidikan politik. Kedua kegiatan komunikasi politik itu merupakan suatu proses dalam membentuk sikap dan perilaku berdasar nilai-nilai yang telah dianggap benar dan telah memberi manfaat bagi kehidupan manusia.

Kata Kunci: Partisipasi politik, sosialisasi, pilkades, masyarakat

ABSTRACT

Political participation of village people will run smoothly if there is political behaviour from the village community and political socialization and good political communication from prospective district head candidates. The district head election takes place, in various ways that often ignore political ethics, such as intrigues terror and money politics. Methods Implementation of community service activities begins with field observations. Implementation of activities to dig up information about monographs and village profile descriptions, the number of village government officials, as well as information about community activities. This community service aims that political and educational socialization for people who are required to choose is very important to do. Efforts to preserve the political system can be done with various political activities, including political socialization and political education. Both activities of political communication are a process of forming attitudes and behaviours based on values that are considered right and have benefits to human life.

Keywords: politic participation, sosialize, pilkades

PENDAHULUAN

Desa adalah sebuah kampung kecil dari negara yang masyarakatnya kadang-kadang hidup nyaman, tentaram dan damai. Desa pula merupakan bagian teritori kecil dari negara. Dalam UU No. 6 tahun 2014, desa dan desa adat serta sebutan lainnya adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

Desa identik dengan hunian para petani. Faktor pertanian, sebenarnya, bukanlah

atribut yang harus melekat pada setiap desa. Atribut utama yang melekat pada desa diindikasikan oleh keterkaitan penduduknya terhadap suatu wilayah tertentu. Keterkaitan penduduk terhadap wilayah tak hanya untuk tempat tinggal, tetapi juga untuk menyangga kehidupan (Rahardjo, 1999 : 29). Sementara Koentjaraningrat menyebut bahwa desa adalah rumpun warga terkecil yang menetap tetap di suatu tempat. Ulasan tersebut memberi arah bahwa desa adalah kesatuan masyarakat tertentu yang hidup di wilayah yang legal dengan jumlah yang terbatas, diikat oleh kesamaan suku-perasaan dan melangsungkan hidup bergantung pada kondisi alam sekitarnya. Kondisi inilah yang menyebabkan desa merupakan penyuplay kekerabatan yang kuat di suatu negara. Pembangunan negara tidak akan berhasil dengan baik manakala mengabaikan proses pembangunan desa. Pembangunan yang dimaksudkan adalah pembangunan yang bersifat materil/fisik maupun imateril/nonfisik. Proses pembangunan suatu negara dikatakan berhasil jika mampu menyeimbangkan pembangunan perkotaan dan pembangunan pedesaan serta mampu meminimalisir kesenjangan sosial, baik kesenjangan sosial di perkotaan maupun di pedesaan. Sebab itulah sejak tahun 2014 pemerintahan Jokowi membuat kebijakan tentang dana desa yang setiap tahunnya jumlahnya terus meningkat. Sejak adanya kebijakan dana desa, desa mulai dilirik oleh banyak orang bukan hanya dalam pembangunan desa tetapi masuk juga politik desa. Liat saja pada saat pemilihan kepala desa (PILKADES) jarang kita menemukan dua calon, yang ada adalah lebih dari dua calon.

Fenomena pemilihan kepala desa menarik untuk dikaji terkait hal *money politic* (politik uang) dalam proses politik PILKADES di era reformasi sekarang ini, bukan rahasia umum lagi bahkan dianggap sebagai prasyarat utama jika ingin menjadi pemenang. Berdasarkan pengamatan Permasalahan yang sama juga ditemukan di desa sukamaju hasil observasi di lapangan pola Masyarakat di desa sukamaju rata-rata berprofesi menjadi seorang petani kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah terkait sosialisasi bagaimana cara memilih pemimpin yang baik, Bagi masyarakat disana lebih penting mendahulukan kepentingan usaha bertani dari pada harus datang untuk memilih kepala desa dalam pilkades. Dan hampir beberapa warga di desa sukamaju sudah acuh terhadap PILKADES dikarenakan konteks politik, kekuasaan yaitu orientasi mengejar prestise sementara prestasi minim bahkan nihil, mengejar nilai materi. sementara rakyat di desanya dibiarkan begitu-begitu saja. Oleh sebab itu perlu adanya pemahaman tentang pendidikan politik yakni pemahaman tentang bagaimana ikut andil dalam kontekstasi PILKADES.

Adapun tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah meberikan pemahaman terhadap masyarakat melalui sosialisai kepada para pemuda, orang tua untuk melibatkan diri dalam urusan-urusan politik desa bukan karena adanya dana desa, tetapi didasari oleh kesadaran, ketulusan, keikhlasan untuk mengabdikan diri demi membangun desa. Jika berberhasil mengelola dana desanya dengan baik melalui BUMDes dan beberapa program lain maka pasti hasilnya akan dirasakan baik oleh masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan pengumpulan dokumen dan wawancara kepada aparatur desa. Data pengumpulan dokumen dan wawancara dikelompokkan menjadi simpulan yang bersifat umum. Generatif simpulan tersebut dijadikan referensi dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat desa Sukamaju.

PELAKSANAAN DAN HASIL

Kegiatan pengabdian di desa sukamaju dilaksanakan oleh mahasiswa yang tergabung dalam TIM yaitu ketua beserta penanggung jawab disetiap program-program. Pelaksanaan dalam pengabdian ini yang salah satu tujuannya adalah memberikan sosialisasi tentang partisipasi masyarakat dalam PILKADES. Fasilitas dalam acara sosialisasi dilakukan di balai desa dengan perizinan bapak PJS kepala desa sukamaju yaitu Bpk. Nyangsang dan tokoh masyarakat dan dihadiri oleh RT/RW dan masyarakat desa sukamaju.

Implementasi program pengabdian

Peserta pelaksanaan program sosialisasi berkisar umur 19 sampai 50 tahun yang ada di desa Sukamaju. Data yang telah dikumpulkan menjadi klasifikasi jiwa pilih kalangan anak muda untuk mendapat penjelasan. Target dari pelaksanaan ini membantu pemahaman tentang proses peran serta dalam mensukseskan PILKADES. Sedangkan umur 50 tahun keatas diklasifikasikan sebagai pemilih yang diberikan bimbingan secara rutin tentang tata cara PILKADES. Sosialisasi politik dan pendidikan bagi warga istimewa masyarakat yang sudah wajib

memilih sangat penting untuk dilakukan. Pelaksanaan sosialisasi bagi para orang tua yang belum memiliki kemampuan dalam mengenal cara memilih kepala desa dilakukan secara rutin yang dilakukan oleh mahasiswa. Kegiatan ini diikuti para perempuan yang ada di kampung Cigowong. Program ini menjadi kesempatan silaturahmi dan belajar bagi Ibu-ibu disana. Tujuan dilaksanakan agar membantu para orang tua dalam mengenal tata cara pencoblosan. Setiap pertemuan para peserta diajarkan dan dibimbing untuk mengenal sistem dan tata cara pencoblosan. Para perempuan yang mengikuti kegiatan rata-rata berprofesi Ibu Rumah Tangga (IRT) memang terkendala tidak bisa baca, dan tidak mengenal huruf. Berdasarkan wawancara dengan perwakilan peserta, usia Ibu-ibu sudah di atas 40 tahun dan banyak yang tidak pernah menempuh pendidikan di tingkat sekolah dasar.

Program penyediaan fasilitas untuk sosialisasi coba diadakan oleh tim pelaksana dengan menempatkan salah salah rumah warga dan kantor kepala desa sebagai Ruang pertemuan. Fasilitas ini sebagai wadah masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan informasi mengenai tata cara dalam PILKADES.

Upaya pelestarian sistem politik dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan politik, antara lain sosialisai politik dan pendidikan politik. Kedua kegiatan komunikasi politik itu diharapkan sebagai proses pembentukan sikap dan perilaku para calon penerima dan penerus sistem PILKADES di masa yang akan datang. Sosialisasi politik dan pendidikan politik kerap dimaknai sebagai suatu aktivitas memengaruhi, mengubah dan membentuk

sikap dan perilaku berdasar nilai-nilai yang telah dianggap benar dan telah memberi manfaat bagi kehidupan manusia.

PEMBAHASAN

Aktivitas partisipasi politik tentu banyak dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Sejumlah ahli menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik (dalam diri seseorang, luar diri seseorang, dan penggabungannya). Surbakti menyatakan dua variabel yang memengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang: 1) aspek kesadaran politik seseorang, yakni kesadaran atas hak dan kewajiban sebagai warga negara. Misalnya hak berpolitik, hak kesejahteraan ekonomi, hak mendapat perlindungan hak hukum, hak jaminan sosial, dan kewajiban dalam sistem politik, kewajiban kehidupan sosial, dan kewajiban lainnya, dan; 2) penilaian dan apresiasinya terhadap pemerintah (kebijakan dan pelaksanaan). Menurut Duto Sosialismanto (dalam Hemegomi Negara Politik Pedesaan Jawa) mendefinisikan PILKADES adalah pesta rakyat, dimana PILKADES dapat dimaknai sebagai suatu peluang untuk menampilkan personal yang dapat melindungi dan memerhatikan kepentingan masyarakat desa (Sosialismanto, 2001:191). Kepala desa sewajarnya dipilih langsung oleh penduduk desa dari kandidat yang telah memenuhi syarat. PILKADES bersifat LUBER-JURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil). Tahapan PILKADES dimulai dari tahap pencalonan hingga tahap pemilihan.

Pembangunan desa terutama penggunaan dana desa banyak diperuntukkan pada program pembangunan yang sifatnya materi

(fisik). Prestasi-prestasi yang tersaji sebelumnya memuat tentang keberhasilan desa dalam membangun yang bersifat fisik. Memang itu tidak salah. Akan tetapi, disamping pembangunan fisik hal yang penting dan harus mendapatkan perhatian serius adalah pembangunan nonfisik (pembangunan imateriil). Begitupun dalam UU no 6 tahun 2014 tentang desa menyuratkan serta menyiratkan pembangunan yang bersifat non-fisik. Pembangunan non-fisik adalah pembangunan yang memfokuskan pada penguatan mental, tabiat, karakter dan pendidikan masyarakat. Pembangunan non-fisik merupakan pembangunan yang berbasiskan pada sosial kapital (modal sosial) masyarakat. Fukuyama membagi dua bagian yang bisa ditemukan dalam definisi modal sosial yaitu; (1) modal sosial merujuk pada kapabilitas yang bersumber dari kepercayaan publik di dalam sebuah masyarakat; (2) modal sosial adalah sederet nilai atau norma informal yang dimiliki secara kumulatif diantara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan indikasi ikatan kerja sama. Modal sosial pula yang merawat bagaimana kesadaran-geneologis, kesadaran-sejarah dan kesadaran-kolektif masyarakat desa tetap terjaga. Kesadaran inilah yang melatar belakangi masyarakat desa walaupun berbeda pilihan politik dalam PILKADES dan anggota BPD, namun masyarakat tetap aman, melebur dan menyatu kembali pasca PILKADES dan anggota BPD yang baru.

Tugas kepala desa bukan hanya menyiapkan fasilitas fisik desa, tetapi mempelajari, merawat, membangkitkan semangat kolektifitas masyarakat desa untuk

membangun desa. Mendorong masyarakat desa agar bermental optimis, berpegang teguh pada warisan budaya, menghadirkan pola kebudayaan baru yang produktif, membiasakan *mindset* masyarakat desa ke arah yang inovatif tanpa harus mengandalkan kekuatan materi. Desain pembangunan yang bersifat fisik maupun non-fisik merupakan konsep pembangunan yang komprehensif. Jika konsep ini diabaikan maka hasil pembangunan dipastikan tidak sesuai harapan, dan takutnya seperti yang dikatakan oleh Sach dimana pembangunan seperti ini (hanya pembangunan fisik) akan melahirkan khayalan, kekecewaan, kegagalan dan kejahatan. Olehnya, paradigma pembangunan harus mengikuti zamannya tanpa mengabaikan kebudayaan dan nilai-nilai lokalnya.

KESIMPULAN

Umumnya minat masyarakat dalam PILKADES dinilai cukup tinggi, karena bagi sebagian masyarakat tidak ada lagi tekanan dan intimidasi politik dari pihak manapun. Namun bagi sebagian masyarakat lain, ditemukan adanya paksaan dari salah satu kandidat calon kepala desa melalui tim suksesnya dengan membagikan kaos dan stiker serta adanya tekanan-tekanan dari para simpatisan fanatis dalam pelaksanaan sebelum dan saat pemilihan berlangsung. Para simpatisan fanatis tersebut memberikan uang kepada sebagian masyarakat agar memilih calon yang disuruh oleh simpatisan fanatis, banyak sekali masyarakat yang mengikuti keinginan para simpatisan fanatis untuk memilih salah satu calon demi imbalan sebelum masuk ke dalam bilik suara.

Selain itu ada juga sebagian masyarakat lainnya memilih calon kepala desa karena memiliki hubungan kekeluargaan dengan salah satu calon. Ragam aktivitas masyarakat antara lain, ikut berpartisipasi aktif, mengamati proses pelaksanaan, dan apatis terhadap PILKADES.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada para penelaah, antara lain: Arif Hidayat, S.S., M.Hum. (STMIK Nusa Mandiri) dan Abdul Kholik, S.Pd.I., M.Pd.I. (Universitas Djuanda) atas saran/masukan konstruktif pada artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dokumen Panitia Pemilihan Kepala Kampung Karetubun tentang Peilkampung
- Kareth, M. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala kampung artikel/[https://
Media.neliti.com](https://Media.neliti.com)
- Peraturan Pemerintah RI N07 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Rahardjo. (1999). *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Gadjah MadaUniversity Press
- Rakhmat, Jalaludin. (2000). *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek*. Bandung: Rosda
- Sosialismanto, Duto. (2001). *Hemegomi Negara Politik Pedesaan Jawa*. Yogyakarta: Laper Pustaka
- Utama
- Soemarsono. (2002). *Komunikasi Politik*. Bandung : Universitas Terbuka
- UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa
- Widjaja, HAW. (2001). *Pemerintahan Desa/Marga* berdasarkan Undang-Undang

Yunus. R. Catatan Desa. Artikel [go.com/2020/01/03](https://www.brometernews.go.com/2020/01/03)
Brometernews